

## Inisiatif *Green Growth*: Kontribusi Korea Selatan dalam Mitigasi Krisis Lingkungan Internasional

Ahmad Farhan <sup>1\*</sup>; M. Syaprin Zahidi <sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Indonesia; [ahmadfarhan1998@gmail.com](mailto:ahmadfarhan1998@gmail.com)

\*Correspondence : [ahmadfarhan1998@gmail.com](mailto:ahmadfarhan1998@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana upaya Korea Selatan berkontribusi dalam mitigasi krisis lingkungan internasional. Kebijakan green growth secara mendasar ditujukan untuk memperbaiki kondisi lingkungan domestik akibat proyek industrialisasi di masa lampau. Namun, dalam implementasinya ternyata Korea Selatan juga menetapkan target untuk menjadi inisiator bagi dunia internasional dalam melakukan mitigasi krisis lingkungan melalui kebijakan ramah lingkungan. Tujuan tulisan ini akan diarahkan pada pembahasan terkait upaya Korea Selatan sebagai negara middle power mewujudkan Rancangan Five Years Plan, khususnya poin kesepuluh yaitu menjadi role model bagi dunia Internasional terkait pengembangan model kebijakan ramah lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan Teknik penelitian kepustakaan (library research). Hasilnya ditemukan bahwa bahwa Korea Selatan memainkan peran sebagai negara *middle power* dalam mengatasi isu lingkungan internasional. Artinya, Korea Selatan berusaha menyadarkan masyarakat internasional akan pentingnya melakukan mitigasi krisis lingkungan hidup melalui *green growth policy*.

### Kata kunci

*green growth; isu lingkungan; dan politik luar negeri*

### ABSTRACT

This study aims to see how South Korea's efforts contribute to mitigating the international environmental crisis. Green growth policies are fundamentally aimed at improving domestic environmental conditions as a result of industrialization projects in the past. However, in practice it turns out that South Korea has also set a target to become an initiator for the international community in mitigating environmental crises through environmentally friendly policies. The purpose of this paper will be directed to a discussion related to South Korea's efforts as a middle power country to realize the Five Years Plan, especially the tenth point, which is to become a role model for the international world regarding the development of environmentally friendly policy models. This study uses qualitative methods with library research techniques (library research). The results found that South Korea played the role of a middle power country in addressing international environmental issues. This means that South Korea is trying to make the international community aware of the importance of mitigating the environmental crisis through a green growth policy.

### Keywords

*green growth, environmental issues, foreign policy*

## Pendahuluan

Perwujudan sistem ekonomi modern selalu mengacu pada tindakan efektif dan strategis agar hal ini dapat tercapai sesuai dengan yang dicita-citakan (Storm & Naastepad, 2005). Salah satu bentuk nyata dari langkah efektif dan strategis dalam perwujudan ekonomi modern dapat ditinjau dari titik balik yang dialami Korea Selatan sehingga menjadi seperti sekarang. Titik balik tersebut terjadi pada saat rezim militer tumbang dan munculnya sosok pemimpin baru yang merupakan buah hasil dari sentuhan demokrasi yakni Park Chung-Hee. Transisi rezim yang berpindah kepada masa kepemimpinan Park Chung-Hee banyak menggambarkan tentang titik tumbuh perkembangan pesat ekonomi Korea Selatan. Rezim Park Chung-Hee berupaya untuk mengatur ulang arah strategi pembangunan ekonomi sehingga dapat membantu Korea Selatan keluar dari keterpurukan (Mortuza Khaled, 2007). Salah satu langkah yang diambil oleh Park Chung-Hee dalam upayanya untuk menumbuhkan ekonomi ialah mengencangkan kegiatan ekspor dari produk-produk industri di Korea Selatan.

Park Chung-Hee mengemas langkah ini dengan suatu kebijakan yang dinamakan *Export-Oriented Industrialization*. Pada dasarnya, melalui kebijakan ini rezim Park Chung-Hee berhasrat untuk mendorong kegiatan ekspor dengan memberi fasilitas tersendiri bagi para eksportir dan membatasi kegiatan impor guna memantik pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Fasilitas yang dimaksud ialah memberi akses kepada para eksportir agar mendapat pinjaman modal dari bank milik negara secara mudah dan juga mendapat lisensi impor khusus agar dapat menunjang kebutuhan operasional industri.

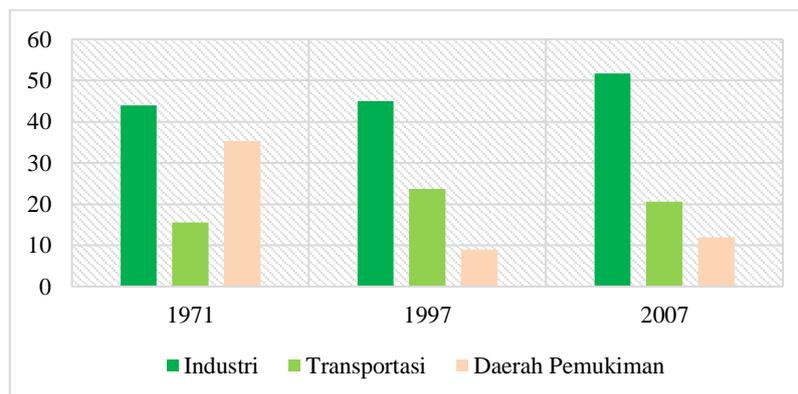
Rangkaian upaya yang dilakukan oleh rezim Park Chung-Hee nampaknya berjalan cukup baik di awal kebijakan tersebut diberlakukan pada 1968, beberapa komoditas hasil industri menuai hasil yang berkualitas dan menorehkan nilai jual yang menjanjikan (Putri, 2016). Langkah yang dilakukan Park Chung-Hee menunjukkan nilai positif. Beberapa komponen sudah mampu menembus omzet puluhan juta dolar Amerika dan khususnya produk tekstil yang dimiliki dapat menembus angka 65,6 juta USD. Berawal dari industri hasil mentah yang dimaksimalkan, saat ini Korea Selatan mampu mengembangkan kegiatan ekspor melalui hasil industri teknologi, alat berat, hingga transportasi dan menjadikan hal tersebut sebagai salah satu kekuatan perekonomian sampai saat ini.

Berkaitan dengan kebijakan *Export-Oriented Industrialization*, Park Chung-Hee berusaha merangkul aktor-aktor swasta (konglomerat) untuk bersama-sama menggerakkan roda perekonomian Korea Selatan. Aktor-aktor ini biasanya disebut sebagai *chaebol* atau jika direfleksikan pada kondisi Korea Selatan saat ini *chaebol* diperankan oleh perusahaan seperti Samsung, Hyundai Motor, LG, Lotte Group, dan lain-lain (Chang, 1988). *Chaebol* sebenarnya sudah banyak berdiri pada masa pemerintahan sebelum Park Chung-Hee, namun pada saat itu alokasi fasilitas kepada *chaebol* banyak disalahgunakan oleh para pemangku kepentingan dengan memberi

servis lebih kepada oknum-oknum yang memiliki “kedekatan” khusus. Barulah pada saat era pemerintahan Park Chung-Hee alokasi fasilitas direvitalisasi guna menunjang perekonomian sesuai dengan tuntutan perkembangan dunia modern. Dengan perekonomian yang memanfaatkan instrumen ‘*chaebol*’, rezim Park Chung-Hee berusaha mengarahkan pertumbuhan ekonomi mandiri dari produk dalam negeri dan dipasarkan kepada dunia internasional. Sehingga konsep *Five Year Development Plans* yang sudah dirancang oleh badan perancang ekonomi (*economic planning boards*) dapat terwujud dengan strategis (Choi, 1983).

Seiring berjalannya waktu, dampak positif pada kebijakan *Export-Oriented Industrialization* yang menghasilkan perusahaan-perusahaan domestik penggerak roda perekonomian Korea Selatan mengalami sedikit kendala. Proyek industrialisasi yang digencarkan dengan menggunakan beberapa komponen industri dari zat-zat tertentu nampaknya berpengaruh terhadap kondisi lingkungan di Korea Selatan. Hal ini terbukti dari rujukan industrialisasi yang dilakukan oleh Korea Selatan dalam kurun waktu 1971-2007, bahwa intensitas pelepasan gas rumah kaca yang terjadi masih cenderung tinggi seperti pada gambar 1.

**Gambar 1.** Produksi Emisi Karbon Hasil Industrialisasi Korea Selatan pada 1971-2007



Sumber: Diolah dari laporan resmi Korea's Green Growth Strategy (2011).(PCGG, 2009)

Berdasarkan gambar 1 maka, berangkat dari perihal inilah kemudian pemerintah Korea Selatan pada tahun 2008 menggagas kebijakan *green growth* dan menetapkannya sebagai salah satu kebijakan nasional. Langkah ini dimaksudkan agar Korea Selatan memiliki regulasi resmi yang membawahi seluruh aktivitas masyarakat maupun perusahaan agar mengalihkan tindakan konsumsi yang lebih ramah lingkungan. Sehingga angka produksi gas rumah kaca yang dimiliki Korea Selatan dapat lebih ditekan dan memiliki kualitas lingkungan yang jauh lebih sehat.

Singkatnya, kebijakan *green growth* Korea Selatan merujuk pada upaya pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan pendekatan yang ramah lingkungan. Artinya, Korea Selatan berusaha untuk mengubah kegiatan industrialisasi yang mengancam lingkungan menjadi kegiatan industry yang pro penghijauan. Menariknya, beberapa penelitian terdahulu menyebutkan bahwa kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada kepentingan domestik. Menurut Ari Putra dan Yusnarida

Eka Nizmi, kebijakan *green growth* Korea Selatan juga ditujukan untuk memberikan contoh bagi dunia internasional untuk turut menumbuhkan perekonomian berbasis penghijauan (Putra & Nizmi Eka, 2014). Studi *International Center of Climate Governance* juga menyebutkan bahwa Korea Selatan berupaya untuk mempromosikan model kebijakan pertumbuhan berbasis penghijauan ini kepada dunia.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa memang secara mendasar, kebijakan *green growth* oleh Korea Selatan diarahkan pada perbaikan kondisi lingkungan domestik. Namun, tinjauan literatur menunjukkan bahwa nantinya orientasi pembangunan tidak hanya diarahkan pada sektor domestik saja, tetapi juga pada skala internasional. Pada poin tersebut dapat dimengerti bahwa nantinya model kebijakan ini dapat dijadikan sebagai instrumen politik luar negeri Korea Selatan. Penulis berasumsi bahwa langkah yang dilakukan oleh Korea Selatan dalam mengadopsi konsep *green growth* menjadi sebuah kebijakan memantik beberapa unsur menarik yang bisa dijelaskan baik ditinjau dari segi domestik maupun urusan kebijakan luar negerinya. Maka dari itu, tulisan ini bertujuan untuk menguraikan secara terperinci terkait peran Korea Selatan dalam prosesnya menjadi *role model* bagi dunia Internasional terkait pengembangan model kebijakan ramah lingkungan.

## Metode

Penelitian yang ini akan dijabarkan menggunakan metode kualitatif. Dengan pendekatan kualitatif, penulis akan menjabarkan masalah, temuan, hingga pembahasan menggunakan uraian naratif. Hal ini akan digunakan peneliti sebagai instrumen penjelas data sesuai dengan operasionalisasi konsep *middle power* dalam topik upaya pemerintah Korea Selatan dalam langkahnya untuk menjadi *role model* bagi dunia Internasional terkait pengembangan model kebijakan ramah lingkungan. Proses pengumpulan data yang dikumpulkan berbentuk *Primary Source Documents* dan juga *Secondary Source Documents*. Maka dari itu, data yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan literatur ilmiah kemudian mengkaji laporan, dokumen, jurnal-jurnal, dan tulisan ilmiah lainnya.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Kebijakan *Green Growth* Korea Selatan

Gagasan model kebijakan *green growth* memiliki arahan cukup strategis untuk diimplementasikan yang termuat dalam *Five-Years Plan* oleh pemerintah Korea Selatan. Melalui arahan yang sudah ditetapkan tersebut beberapa *stakeholder* bertanggungjawab untuk turut berpartisipasi agar dapat menunjang gagasan *green growth*. *Stakeholder* yang dimaksud adalah pemerintah, para *chaebol*, dan masyarakat. Dalam rancangan arahan tersebut konsep *green growth* ditujukan untuk dapat memenuhi beberapa target seperti pada tabel 1.

**Tabel 1:** Five Year Plan Kebijakan *Green Growth* Korea Selatan

No.	Sasaran	Target Pencapaian
1.	Mengurangi emisi gas rumah kaca secara efektif.	5 Tahun (2009-2013)
2.	Mengurangi penggunaan bahan bakar berbahan fosil serta meningkatkan produksi energi baru secara mandiri.	5 Tahun (2009-2013)
3.	Menguatkan kapabilitas negara agar dapat menciptakan energi ramah lingkungan.	5 Tahun (2009-2013)
4.	Mengembangkan teknologi ramah lingkungan (teknologi hijau).	5 Tahun (2009-2013)
5.	Merekonstruksi dunia industri agar selaras dengan gagasan <i>green growth</i> .	5 Tahun (2009-2013)
6.	Konsisten menjaga kemajuan industri.	5 Tahun (2009-2013)
7.	Merancang dasar kebijakan teknologi ramah lingkungan.	5 Tahun (2009-2013)
8.	Revitalisasi lingkungan (lahan, air, dan infrastruktur).	5 Tahun (2009-2013)
9.	Mengaplikasikan gagasan <i>green growth</i> dalam kehidupan sehari-hari.	5 Tahun (2009-2013)
10.	Menjadi <i>role model</i> bagi dunia Internasional terkait pengembangan model kebijakan ramah lingkungan.	5 Tahun (2009-2013)

Sumber: Diolah dari Rancangan Kebijakan Lima Tahun *Green Growth* Korea Selatan (2008). (Joint Interagency of Korean Government, 2014)

Berdasarkan informasi dari tabel 1 tersebut dapat dipahami bahwa pada poin terakhir Pemerintah Korea Selatan ingin menjadikan kebijakan ini membawa dampak bagi aspek internasional. Korea Selatan ingin menjadi contoh bagi dunia bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan secara beriringan dengan upaya mitigasi krisis lingkungan hidup. Model kebijakan ini akan menjadi instrumen bagi Korea Selatan untuk menunjukkan citra yang baik dihadapan internasional perihal isu lingkungan (R. S. , & Y. B. Jones, 2011).

Menurut Roger Fouquet, setidaknya terdapat tiga tujuan spesifik atas dirumuskannya rencana jangka Panjang ini guna mencapai cita-cita Korea Selatan untuk menjadi role model dalam urusan penerapan model kebijakan *green growth*. Tujuan pertama adalah adaptasi perubahan iklim dan kemandirian energi. Tujuan ini bertujuan untuk mengurangi emisi GRK dan mencapai kemandirian energi dengan meningkatkan porsi energi terbarukan daripada konsumsi bahan bakar fosil (Fouquet, 2019). Tujuan kedua adalah penciptaan mesin baru untuk pertumbuhan ekonomi dan menekankan pemeliharaan teknologi hijau dan industri hijau. Tujuan

ketiga, peningkatan kualitas hidup dan peningkatan kedudukan internasional Korea Selatan, melibatkan praktik hijau dalam penggunaan lahan, infrastruktur transportasi, dan gaya hidup umum (PCGG, 2009a). Selain itu, *Framework Act on Low Carbon* sebagai dasar hukum pertumbuhan hijau Korea Selatan akan diberlakukan pada Januari 2010. Aturan ini menetapkan berbagai topik yang sangat luas termasuk gas rumah kaca, energi, penggunaan lahan, lingkungan dan pertumbuhan ekonomi (Fouquet, 2019).

Pengalaman *green growth* Korea Selatan terus bertambah seiring dengan implementasi rencana jangka panjang (*Five Year Plan*) dan perpindahan rezim yang terjadi (kurang dari 10 tahun). Pada tahap pertama (2009–2013), berbagai program pertumbuhan ekonomi hijau dilaksanakan dengan dukungan kuat dari presiden, namun kinerja selama periode tersebut tidak sukses yang diharapkan pemerintah. Emisi gas rumah kaca dan porsi energi terbarukan belum mencapai tujuan ambisius yang telah ditetapkan oleh pemerintahan Lee Myung-Bak (Lee & Yu, 2012).

Sebaliknya, pada tahap kedua (2014–2018) kemungkinan untuk mencapai target tampak tinggi karena pemerintah merevisi target atau menetapkan target yang lebih pasif. Tidak ada situasi yang diinginkan. Kini, pertumbuhan ekonomi hijau menghadapi tantangan baru di bawah pemerintahan baru. Presiden Moon Jae-in telah berjanji untuk menghentikan pembangkit listrik tenaga nuklir dan batubara secara bertahap dan untuk memperluas energi terbarukan dan pembangkit listrik tenaga gas alam cair (LNG). Berbeda dengan pemerintahan Lee Myung-bak, Park Geun-hye yang menunjukkan sikap pasif terhadap ekonomi rendah karbon dan perubahan iklim, pemerintahan petahana bertujuan pada perubahan mendasar (GGGI, 2013). Maksudnya, pemerintahan Park Geun-hye memiliki orientasi untuk menuju masyarakat rendah karbon dengan tujuan ambisius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun sedikit berbeda, namun keduanya memiliki orientasi yang sama yakni penguatan upaya mitigasi krisis lingkungan hidup. Hal yang membedakan adalah pendekatan holistik dan pragmatis (Kim, 2015).

Hal itu telah memicu perdebatan sengit tentang tagihan listrik, pasokan listrik, potensi energi terbarukan, dan sebagainya. Pengalaman masa lalu memberitahu kita bahwa tujuan yang optimis dan ambisius hanya dapat dicapai jika didasarkan pada penilaian yang akurat atas kondisi saat ini dan disertai dengan kebijakan yang tepat dan dirancang dengan baik (S. J. Lee, 2016). Rencana aksi khusus yang dirancang dari diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan dan dukungan politik yang berkelanjutan diperlukan untuk mewujudkan visi pemerintahan baru. Dalam konteks ini, dapat disimpulkan bahwa strategi *green growth* Korea Selatan masih dalam proses konsolidasi menuju jalur baru yang lebih hijau.

## 2. Peran Korea Selatan dalam Perbaikan Isu Lingkungan Internasional Melalui Kebijakan *Green Growth*

### a. Pelopor Model Kebijakan

Gagasan *green growth* memang pada awalnya dicetuskan oleh pemerintah Korea Selatan untuk menjadi bentuk tanggung jawab atas proyek industrialisasi beberapa waktu silam. Proyek industrialisasi yang digencarkan dengan menggunakan beberapa komponen industri dari zat-zat tertentu nampaknya berpengaruh terhadap kondisi lingkungan di Korea Selatan. Langkah ini menunjukkan bahwa Korea Selatan memiliki keinginan kuat dalam mengatasi masalah krisis lingkungan. Hal itu juga merupakan pondasi awalnya dalam membentuk citra kepada dunia internasional bahwa sudah ada langkah nyata yang dilakukan oleh Korea Selatan. Bahkan, inisiasi cepat oleh Korea Selatan ini diperkuat oleh pernyataan Lee Myung Bak dalam KTT G8 ke-34, yakni:

*“Korea tidak akan ragu-ragu dalam mengambil langkah terdepan pada permasalahan ini. Justru pada saat-saat seperti ini bukan saatnya untuk mengatakan “kamu dulu”, tapi “saya dulu”. Karena menangani perubahan iklim secara efektif harus dimulai dari perbaikan kebiasaan diri sendiri, baru nantinya akan memberikan dampak yang luas”* (S. J. Lee, 2016).

Dalam memenuhi tujuan tersebut, Korea Selatan mewujudkannya dengan menguatkan implementasi kebijakan domestik dan juga menyusun rancangan kebijakan yang biasa disebut dengan *Five Years Plan* pada tahun 2011. Upaya Korea Selatan melembagakan kebijakan *green growth* menjadi rancangan yang formal tersebut dibentuk dengan tujuan untuk mengarahkan fokus Korea Selatan dalam memerangi perubahan iklim pada forum UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change). Sehingga sebelum diratifikasinya forum ini pada 2014, Korea Selatan sudah memiliki rekam jejak tindakan dengan tujuan serupa.

Pada rezim pemerintahan Lee Myung-Bak, Korea Selatan mendirikan *Global Green Growth Institute* (GGGI) dan *Green Technology Center* (GTC) sebagai pusat pertumbuhan hijau global, yang mengembangkan kebijakan pertumbuhan hijau dan teknologi hijau yang dapat diterapkan di negara berkembang (S. J. Lee, 2019). Korea Selatan juga menjadi tuan rumah sekretariat Green Climate Fund (GCF) pada tahun 2012. Upaya ini merupakan representasi sekaligus perwujudan dari *Five Years Plan* Korea Selatan dalam aspek internasional (poin kesepuluh).

Sedangkan pada masa pemerintahan Park Geun-hye, implementasi model kebijakan *green growth* pada aspek internasional juga selaras dengan pendekatan pragmatis yang dilakukan. Pemerintahan Park Geun-hye mencoba memainkan peran yang lebih spesifik untuk menguatkan ambisi menjadi role model di dunia internasional dengan cara menguatkan kerjasama atau kemitraan lingkungan dalam cakupan global (Kim, 2015). Hal ini dilakukan dengan cara memberi respon efektif terhadap negosiasi iklim, melakukan kerja sama global dalam pertumbuhan hijau, dan memperkuat kerja sama dengan negara berkembang melalui GGGI (*Global Green Growth Institute*) / GCF (*Global Climate Fund*). (R. S. Jones & Yoo, 2010).

## **b. Korea Selatan Sebagai Narahubung Kepentingan dalam Menyelesaikan Isu Lingkungan Internasional**

Dalam perihal pembenahan kondisi lingkungan global, jelas nampak adanya kesenjangan yang cukup memprihatinkan antara negara maju dan negara berkembang. Negara-negara maju seperti China misalnya, menjadi negara dengan urutan pertama penghasil emisi karbon terbesar di dunia yakni 30% (Watson, 2014). Namun nampaknya China cenderung mengabaikan upaya pengurangan emisi gas karbon global dan lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi nasionalnya. Begitu juga dengan Amerika Serikat yang memiliki presentase produksi emisi karbon sebesar 15% (berada satu peringkat di bawah China), ia lebih memilih untuk menolak upaya komunitas global menyelesaikan kasus krisis lingkungan ini seperti Protokol Kyoto atau konferensi lainnya. Amerika Serikat lebih memilih mengatasi permasalahan ini secara mandiri dan mengabaikan konsensus negara-negara berkembang yang dianggapnya cukup merugikan pihak Amerika Serikat (Nye, 2008). Hal itupun tentunya sangat bertolak belakang dengan upaya beberapa negara lain untuk mengurangi emisi gas karbon.

Melihat pada konstelasi ini, Korea Selatan hadir menunjukkan keseriusannya melakukan perbaikan nyata. Korea Selatan memberikan beberapa inisiatif terkait pembenahan emisi gas karbon dan gas rumah kaca dalam jangkauan global baik bagi negara maju maupun negara berkembang, di antaranya:

- a) *Unilateral Clean Development Mechanism*, pada upayanya ini Korea Selatan menyediakan instrumen bagi negara berkembang untuk mendapatkan kredit dalam melakukan tindakan mitigasi gas rumah kaca melalui pendekatan yang lebih pro-ekologis (Michaelowa, 2007). Teruntuk negara maju, dalam hal ini mereka berperan memberikan penunangan intensif baik dari segi materil maupun non-materil.
- b) *The UNFCC NAMA Registry*, pada upayanya menjembatani peran negara maju dan berkembang dalam mengurangi emisi gas karbon ini, Korea Selatan mencoba membentuk sebuah skema bagi partisipan UNFCC. Dalam skema ini, negara berkembang dapat mengajukan diri sebagai partisipan mitigasi emisi gas karbon dan menerima pinjaman untuk upaya yang akan dilakukan (Parikh & Baruah, 2012). Sedangkan negara maju berperan untuk menjadi pihak MRV (pengukuran, pelaporan, dan verifikasi) dalam proses mitigasi baik untuk ukuran derajatnya maupun bagi negara berkembang. Sehingga pada proses ini negara berkembang dan negara maju akan mendapat pengakuan internasional atas upayanya melakukan mitigasi gas rumah kaca maupun emisi gas karbon.

Kedua usaha yang dilakukan oleh Korea Selatan tersebut merupakan representasi dari pola negara *middle power* yaitu *bridge builder* atau jika diterjemahkan artinya ialah narahubung kepentingan. Dalam konteks ini, Korea Selatan berusaha

menjembatani kepentingan antara negara besar dan negara kecil perihal isu lingkungan. Wujud nyatanya ialah memberikan kredit untuk negara kecil agar usaha perbaikan isu lingkungan internasional dapat diimplementasikan secara merata. Selain itu, Korea Selatan juga berpartisipasi dalam pembuatan skema pembangunan hijau dalam UNFCCC agar negara kecil dan negara besar memiliki porsi yang seimbang dalam penurunan gas emisi karbon. Penulis berasumsi bahwa usaha ini sudah cukup membuktikan bahwa Korea Selatan menunjukkan perannya sebagai negara *middle power* perihal penerapan model kebijakan *green growth*.

### c. Aktor Utama dalam Pembangunan “Ramah Lingkungan”

Rangkaian upaya di atas semakin menunjukkan langkah Korea Selatan yang benar-benar ingin menciptakan citra di hadapan dunia internasional bahwa dirinya adalah penggagas norma pembenahan ekologis dalam lingkup global. Ternyata seiring dengan proses yang dilakukan, Korea Selatan mulai menuai hasil yang cukup membanggakan. Hal ini ditandai dengan terpilihnya Korea Selatan sebagai tuan rumah *Green Climate Fund*.

*Green Climate Fund* atau GCF merupakan lembaga yang terbentuk melalui sidang umum *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) di Cancun, Meksiko pada tahun 2010 (Vanderheiden, 2015). Pembentukan GCF bertujuan untuk mendukung upaya mengurangi gas rumah kaca dan mengatasi perubahan iklim di negara-negara berkembang. Faktanya bahwa negara-negara berkembang memiliki kerentanan yang lebih besar dibandingkan dengan negara-negara maju. Hal ini disebabkan oleh berbagai macam faktor yang membatasi kemampuan mereka dalam merespons dan menanggulangi dampak perubahan iklim, khususnya *Last Developed Country* (LDC) dan negara-negara Afrika yang memiliki indeks kemiskinan tinggi. Dengan demikian, PBB memandang perlu untuk memberikan dukungan dana dan transfer teknologi untuk membantu negara-negara berkembang tersebut sebagai pertahanan dalam menghadapi perubahan iklim. Oleh karena itu, diperlukan kesepakatan antara negara-negara maju untuk menyumbangkan dana kepada GCF dengan tujuan membantu negara berkembang mengurangi emisi mereka dalam upaya memerangi perubahan iklim.

Dalam sidang umum GCF yang digelar pada tahun 2011 di Durban, Afrika Selatan, Korea Selatan menyatakan keinginannya untuk menjadi tuan rumah dari GCF. Hasilnya, dalam pertemuan kedua GCF di Songdo pada bulan Oktober 2012, Korea Selatan berhasil memenangkan kesempatan tersebut dengan mengalahkan 6 negara seperti Jerman, Swiss, Meksiko, dll. Sekretariat GCF kemudian ditempatkan di Distrik Songdo, Incheon (KBS World Radio, 2013).

Berdirinya sekretariat GCF di Songdo, diprediksi oleh *Korean Development Institute* (KDI) dapat berimplikasi pada aspek ekonomi senilai 380 miliar won pertahun (KBS World Radio, 2013). Korea Selatan sebagai tuan rumah GCF juga sangat menaruh perhatiannya berkaitan dengan urgensi permasalahan iklim bagi negara-negara berkembang. Dalam suatu pidatonya, Moon Jae In, presiden Korea

Selatan menyatakan kontribusinya dalam GCF yang mana negaranya akan meningkatkan sumbangan dari yang sebelumnya berjumlah 100 juta dollar AS pada tahun 2015-2018, menjadi 200 juta dollar AS di periode 2020-2023 mendatang.

Melalui implikasi seperti yang terjadi dalam protokol kyoto dan juga forum *Green Climate Fund* itu menjadi pembuktian bahwa inovasi kebijakan dari Korea Selatan ini tidak hanya berguna bagi perbaikan arah pembangunan domestik saja. Akan tetapi hal ini mampu menjadi instrumen Korea Selatan untuk menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang mampu tumbuh maju namun tetap memperhatikan masalah-masalah global (isu lingkungan). Bahkan menurut pandangan penulis, dalam hal ini Korea Selatan tidak hanya berhasil menjadi *role model* bagi negara-negara dalam Protokol Kyoto. Akan tetapi ia juga bisa memberikan sumbangsuhnya berupa suntikan dana kepada negara-negara berkembang yang terlibat dalam *Green Climate Fund* agar bisa dimanfaatkan untuk melakukan pembangunan dengan asas ramah lingkungan pula.

Setelah memiliki kekuatan itu, implementasi *green growth* yang dibangun Korea Selatan nampaknya mulai dapat berkembang di ranah internasional. Munculnya GGGI (*Global Green Growth Institute*) pada tahun 2012, sebagai salah satu organisasi internasional di bawah wewenang Korea Selatan menjadi pembuktian ia mampu menjadi inisiator model pembangunan ramah lingkungan. Organisasi ini bertujuan untuk memberikan transfer ide ataupun kebijakan kepada negara partisipan untuk menerapkan kebijakan pembangunan ramah lingkungan di negara mereka. Transfer kebijakan tersebut dilakukan secara komprehensif meliputi kelembagaan resmi *green growth*, pokok kebijakan menggunakan konsep *green growth*, dan juga pinjaman dana. GGGI sudah berhasil membantu mengembangkan konsep pembangunan ramah lingkungan di beberapa negara seperti India, Yordania, Mongolia, Peru, Ethiopia Filipina, Rwanda, Thailand, Indonesia Vietnam, Cina dan Brasil. Bahkan, organisasi ini sudah dilabeli oleh OECD sebagai Bantuan Pembangunan Resmi (*Official Development Assistance*) pada *Organisation for Economic Cooperation and Development - Development Assistance Committee* tahun 2013. Karunia yang diperoleh Korea Selatan ini lagi-lagi semakin menunjukkan kapabilitasnya sebagai inisiator pembangunan ramah lingkungan dunia.

Inisiasi Korea Selatan sebagai aktor utama dalam pembangunan ramah lingkungan di dunia internasional telah ditunjukkan melalui beberapa usahanya untuk menetapkan badan khusus yang menaungi urusan pembangunan hijau di dunia internasional. Penulis berasumsi bahwa usaha ini memiliki konotasi bahwa Korea Selatan ingin meningkatkan *awareness* atau kesadaran masyarakat internasional atas pentingnya pembangunan berkelanjutan berbasis ramah lingkungan. Seperti contoh, diciptakannya GGGI merupakan usaha Korea Selatan untuk melakukan akselerasi pemahaman pembangunan ramah lingkungan bagi negara lain. Selain itu, transfer ide yang menjadi fungsi operasional dari GGGI dapat

menjadi acuan negara lain atas urgensi pertumbuhan hijau (*green growth*) bagi sebuah negara (Zelenovskaya, 2012).

Jika dikontekstualisasikan dalam konsepsi *middle power*, maka usaha ini akan relevan dengan pola *coalition building* dan *norms diffuser*. Secara harfiah, *coalition building* diartikan sebagai usaha negara untuk membangun koalisi atau sebuah badan yang berorientasi dalam penyelesaian suatu isu tertentu. Sedangkan *norms diffuser* berarti negara tersebut berusaha menyebarkan ide yang membentuk kesadaran bagi masyarakat internasional atas isu tertentu. Pembentukan *Global Green Growth Institute* dan pembentukan forum *Green Climate Fund* merupakan wujud konkret bahwa hal itu adalah bukti dari penerapan *coalition building*. Namun, secara tidak langsung hal itu juga menunjukkan penerapan dari *norms diffuser*. Hal itu dapat dikonfirmasi pada fungsi dari pembentukan forum dan institusi terkait, dimana GGGI berfungsi sebagai badan yang memfasilitasi transfer ide model kebijakan dan GCF berfungsi sebagai fasilitator materi dari penerapan pembangunan hijau. Artinya, Korea Selatan memberikan penekanan bahwa pembangunan berbasis ramah lingkungan memang penting untuk segera dilakukan. Tidak hanya bermodalkan ide tetapi Korea Selatan juga memberikan fasilitas dan materi kepada masyarakat internasional.

## Kesimpulan

Pembuktian Korea Selatan dalam mengungkap identitasnya sebagai *role model* pembenah krisis lingkungan di kancah internasional setidaknya dapat ditinjau dari beberapa indikator. Pertama, Korea Selatan telah menunjukkan perannya sebagai pelopor kebijakan, dengan mengambil langkah mandiri dalam menggunakan pendekatan ramah lingkungan yakni model kebijakan *green growth* pada pembangunan domestiknya. Kedua, Korea Selatan hadir sebagai sosok pembeda dalam upaya mitigasi krisis lingkungan internasional dengan menjembatani kepentingan negara maju dan berkembang. Ketiga, Korea Selatan nyatanya mampu menjadi pemeran utama dalam langkah dunia internasional mengurangi emisi karbon dengan berbagai inisiasinya mengatasi permasalahan lingkungan ini. Ketiga indikator itu menjadi bukti nyata bahwa Korea Selatan memang menunjukkan citranya sebagai negara yang cukup serius menggagas ide pembangunan berbasis pendekatan ramah lingkungan. Mengacu pada alat analisa, maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Korea Selatan memainkan peran sebagai negara *middle power* dalam mengatasi isu lingkungan internasional. Usaha Korea Selatan untuk membentuk forum khusus dan memfasilitasi beberapa pertemuan yang membahas seputar pertumbuhan hijau untuk kepentingan lingkungan internasional selaras dengan perilaku negara *middle power* yaitu *bridge builder* dan *coalition building*. Sedangkan usaha yang ditunjukkan Korea Selatan dalam melakukan sosialisasi tentang implementasi model kebijakan *green growth* dan memposisikan diri sebagai *role model* dari kebijakan tersebut adalah wujud dari *norms diffuser*. Artinya, Korea

Selatan berusaha menyadarkan masyarakat internasional akan pentingnya melakukan mitigasi krisis lingkungan hidup melalui *green growth policy*.

## Referensi

- Chang, C. S. (1988). Chaebol: The South Korean Conglomerates. *Business Horizons*, 2(31), 51–57.
- Choi, S. (1983). South Korea Under Park Chung Hee: Development or Decay? In *Bulletin of Concerned Asian Scholars* (Vol. 15, Issue 2, pp. 67–72). <https://doi.org/10.1080/14672715.1983.10404877>
- Fouquet, R. (Ed. ). (2019). *Handbook on Green Growth*. Edward Elgar Publishing.
- Joint Interagency of Korean Government. (2014). *The Second Five Year Plan for Green Growth*.
- Jones, R. S. , & Y. B. (2011). *Korea's Green Growth Strategy: Mitigating Climate Change and Creating New Growth Engines*.
- Jones, R. S., & Yoo, B. (2010). *Korea's Green Growth Strategy: Mitigating Climate Change and Developing New Growth Engines*. <https://doi.org/10.1787/5kmbhk4gh1ns-en>
- KBS World Radio. (2013). *Sekretariat Dana Iklim Hijau (GCF) di Korea mulai dioperasikan*. Warta Berita.
- Kim, S. Y. (2015). *East Asia Forum: South Korea Doubles Down on Green Growth*.
- Lee, J.-Seung., Yu, J.-Min., & Institut Français des Relations Internationales. (2012). *The economic opportunities and constraints of green growth the case of South Korea*. IFRI.
- Lee, S. J. (2016). *Transforming Global Governance with Middle Power Diplomacy: South Korea's Role in the 21st Century*. Springer.
- Lee, S. J. (2019). *Transforming Global Governance With Middle Power Diplomacy Edited By South Korea's Role In The 21st Century*.
- Michaelowa, A. (2007). Unilateral CDM-can developing countries finance generation of greenhouse gas emission credits on their own? *International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics*, 7(1), 17–34. <https://doi.org/10.1007/s10784-006-9026-y>
- Mortuza Khaled. (2007). *Park Chung-Hee's Industrialization Policy and it's Lessons for Developing countries*. 23–25.
- Nye, J. S. (2008). Security and smart power. *American Behavioral Scientist*, 51(9), 1351–1356. <https://doi.org/10.1177/0002764208316228>
- Oktafia Rachmawati Putri. (2016). *Developmental State di Era Park Chung-hee dan Warisannya terhadap Ekonomi Politik Korea Selatan*. Universitas Bakrie.
- Parikh, J., & Baruah, L. (2012). *A New Framework for the UNFCCC Common but Differentiated Responsibilities among Non-Annex I Countries*.
- PCGG. (2009). *Green Growth National Strategy [in Korean]*. Seoul: Presidential Committee on Green Growth (PCGG).

- Putra, A., & Nizmi Eka, Y. (2014). Implementasi Kebijakan Green Growth Korea Selatan. *Jom FISIP*, 1(2).
- Storm, S., & Naastepad, C. W. M. (2005). Strategic Factors in Economic Development: East Asian Industrialization 1950-2003. *Development and Change*, 36(6), 1059–1094. <https://doi.org/10.1111/j.0012-155X.2005.00450.x>
- Vanderheiden, S. (2015). Justice and climate finance : Differentiating responsibility in the Green Climate Fund. *International Spectator*, 50(1), 31–45. <https://doi.org/10.1080/03932729.2015.985523>
- Watson, I. (2014). Green Growth, Neoliberalism and Conflicting Hegemonic Interests: The Case of Korea. *International Critical Thought*, 4(1), 53–66. <https://doi.org/10.1080/21598282.2014.878149>
- Zelenovskaya, E. (2012). *Green Growth Policy in Korea: A case study 1 ICCG Think Tank Map: a worldwide observatory on climate think tanks Green Growth Policy in Korea: A case study Green Growth Policy in Korea: A case study*. [www.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf/?cote=ECO/WKP%282010%2954&doclanguage=en](http://www.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf/?cote=ECO/WKP%282010%2954&doclanguage=en)